

## **PRAKTIK POLITIK ISLAM: KEPEMIMPINAN TALIBAN DI AFGHANISTAN DALAM TINJAUAN POLITIK ISLAM KAWASAN**

**Choirur Rois<sup>1</sup>**

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [02050122024@student.uinsby.ac.id](mailto:02050122024@student.uinsby.ac.id)

**Nur Robaniyah<sup>2</sup>**

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [02050122036@student.uinsby.ac.id](mailto:02050122036@student.uinsby.ac.id)

Diterima: 3 Mei 2023

Disetujui: 6 Juni 2023

Dipublikasikan: 27 Juni 2023

### **Abstract**

*The ideological confrontation between nationalism, marxism and absolute monarchy, and Islamic fundamentalism has succeeded in constructing Afghanistan as an Islamic country full of conflict. This paper wants to answer questions that arise from the stigma and insinuation of Islamic radicals, Islamic terrorist, and Islamophobia which are the logical consequences of Islamic political practices in Afghanistan played by the Taliban. Through a historiographical approach based on descriptive qualitative and data collection using the method desk research and annotated bibliography the findings in this article conclude that the political practices that took place in Afghanistan under the leadership of the Taliban were the ambitions of fundamentalist groups who wanted full control over Afghanistan under the pretext of implementing Islamic law. However, in reality, it does not reflect the political practices described by Islam. The Taliban use the name of Islam to legitimize all acts of violence, coups, and all efforts to achieve their goals, because the image of Islam has become negative in the eyes of the international community. Based on these findings, accusations of Islamic radicals, Islamic terrorist, and Islamophobia towards Islam and Muslims stemming from the Afghanistan conflict and the political practices of the Taliban are accusations that cannot be justified and are rejected based on facts on the ground. On the other hand, western interference and hegemony play a role in further exacerbating the situation and tainting the image of Islam and Muslims through the Afghanistan conflict, so that the panorama that is portrayed is a negative impression of Islamic ideology and Muslim countries.*

**Keywords:** Afghanistan, Taliban, Political Practices

### **Abstrak**

Konfrontasi ideologi antara nasionalisme, marxisme dan monarki absolut serta paham Islam fundamentalis telah berhasil menjadikan Afghanistan sebagai negara Islam penuh konflik. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan yang muncul dari stigma dan insinuas Islam radikal, Islam teroris dan islamofobia yang menjadi konsekuensi logis dari praktik politik Islam di Afghanistan yang diperankan oleh Taliban. Melalui pendekatan historiografi dengan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode *desk research* dan *annotated bibliography* temuan dalam artikel ini menyimpulkan bahwa praktik politik yang terjadi di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban merupakan ambisi kelompok fundamentalis yang ingin berkuasa penuh atas Afghanistan dengan dalih penerapan syariat Islam. Namun pada kenyataannya tidak mencerminkan praktik politik yang digambarkan Islam. Taliban menggunakan nama Islam untuk melegitimasi segala tindakan kekerasan, kudeta dan segala upaya

mencapai tujuannya, karena citra Islam menjadi negatif di mata internasional. Berdasarkan temuan tersebut tuduhan Islam radikal, Islam teroris dan sikap Islamofobia terhadap Islam dan muslim yang berangkat dari konflik Afghanistan dan praktik politik Taliban merupakan tuduhan yang tidak dapat dibenarkan dan tertolak berdasarkan fakta lapangan. Di sisi lain campur tangan dan hegemoni barat berperan untuk semakin memperburuk keadaan dan mencemari citra Islam dan muslim melalui konflik Afghanistan, sehingga panorama yang terpotret adalah kesan negatif terhadap ideologi Islam dan negara muslim.

**Kata-kata kunci:** Afghanistan, Taliban, Praktik Politik

## A. PENDAHULUAN

Afghanistan merupakan negara Islam dengan persentase 90% atau 84,7-89,7% berafiliasi Islam Sunni, 10-15% dari jumlah populasi berafiliasi Islam Syiah dan 0,3% sisanya terdiri dari agama minoritas seperti kristen dan agama lainnya<sup>1</sup>. Artinya dapat dikatakan bahwa Afghanistan 99,7% penduduknya adalah muslim. Secara kuantitas Afghanistan sangat potensial untuk menjadi negara Islam yang mampu untuk mengaplikasikan nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan *good country* atau dalam bahasa Islamnya *baldatun tayyibatun*. Namun, keberadaan Islam secara kuantitas tersebut tidak mencerminkan Afghanistan sebagai *baldatun tayyibatun* atau negara muslim yang islami, mengingat sampai hari ini negara tersebut masih tergolong negara dengan status negara konflik berkepanjangan, tercatat selama 42 tahun sejak intervensi yang dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1979 hingga awal Agustus 2021 pasca kemunduran Amerika Serikat (AS), Afghanistan berada di pusara konflik dan peperangan internal dan eksternal<sup>2</sup>. Selain itu Samra Naz dan Zafar Nawaz Jaspal mencatat Afghanistan sebagai panggung propaganda negara super power sejak abad ke-19<sup>3</sup>.

Afghanistan di bawah rezim Taliban mempunyai gagasan keislaman yang kuat. Taliban menginginkan hukum Islam ditegakkan sebagai institusi negara<sup>4</sup>. Terbukti setelah kelompok tersebut berhasil menguasai Afghanistan dengan aksi kudetanya atas kepemimpinan Ashraf Ghani sebagai presiden sah Afghanistan pada 2021 silam menjadikan Afghanistan yang semula berupa Republik Islam Afghanistan berubah menjadi Imarah Islam Afghanistan. Keberhasilan Taliban menggulingkan kepemimpinan

---

<sup>1</sup> Bell James, "The World's Muslims: Unity and Diversity, Pew Research Center," 2016.

<sup>2</sup> Freshta Qarqeen, "Afghan Peace Talks: Negotiating with the Taliban," 2015; Baca juga, Robi Sugara, "Upaya Dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan Melalui Bina-Damai," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2021): 27–38.

<sup>3</sup> Samra Naz dan Zafar Nawaz Jaspal, "Afghanistan: The Possible Arena for Major Powers Inevitable Cooperation," *South Asian Studies* 36, no. 1 (2022).

<sup>4</sup> Ahda Abid Al-Ghifari, "Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)," *BAB II Afghanistan sebelum Taliban (skripsi): <http://eprints.uny.ac.id/21178/6/BABIIPdf> (hal 36). diakses pada tanggal 23 (2021).*

Presiden Ashraf Ghani menimbulkan berbagai justifikasi di mata dunia internasional. Hal tersebut berimplikasi terhadap pengakuan hukum internasional secara *de jure* terhadap status keabsahan kepemimpinan rezim Taliban, meskipun secara *de facto* Taliban hari ini adalah penguasa Afghanistan<sup>5</sup>. *Track record* Taliban di mata internasional juga mempunyai dampak negatif pandangan negara-negara kawasan terhadap masa depan Afghanistan di masa mendatang di bawah kekuasaan Taliban. Selain itu, kemunculan Taliban pada September 1994 yang mulanya mendapat dukungan penuh dari Amerika, namun kemudian ditumpas sendiri oleh Amerika atas dalih menjalin kerjasama dan melindungi pemimpin Al Qaeda Osama Bin Laden juga memunculkan stigma bahwa Taliban adalah sekutu jaringan teroris internasional<sup>6</sup>.

Keberhasilan kudeta Taliban terhadap pemerintahan yang sah di Afghanistan menciptakan krisis ekonomi dan politik di negara tersebut. Tidak hanya itu, eksodus secara besar-besaran warga sipil Afghanistan turut menjadi dampak kudeta tersebut. Di samping itu, keadaan tersebut juga mengundang banyak penolakan dunia internasional pro Amerika dan rezim Asraf Ghani terhadap eksistensi rezim Taliban<sup>7</sup>. Fakta selanjutnya adalah era kepemimpinan Taliban setelah sukses menduduki kursi pemerintahan di Afghanistan menurut Rafika Wahyu Andani dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi perempuan di Afghanistan semakin memburuk. Menurutnya, ancaman dan kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan menunjukkan arogansi dan diskriminatif dari perilaku rezim Taliban,<sup>8</sup> temuan penelitian Rafika Wahyu Andani tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji Wibowo yang menyatakan, Afghanistan di bawah rezim Taliban dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian internasional hak asasi manusia terhadap perempuan<sup>9</sup>.

Konflik yang berkepanjangan di Afghanistan selama dua dasawarsa tidak sedikit memakan korban jiwa, hasil penelitian *The Watson Institute for International and Public Affairs* yang dimuat oleh tempo.co tercatat sejak 2001-2021 konflik antara kelompok Taliban dan pemerintahan Afghanistan di bawah bayang-bayang AS menelan korban

---

<sup>5</sup> Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Legalitas Pergantian Kekuasaan Di Afganistan Melalui Coup D'etat Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022): 469–93.

<sup>6</sup> Kadek Surya Alit Dharma Putra, "ANEKSASI AFGHANISTAN TERHADAP TALIBAN TAHUN 2021," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022): 915–27.

<sup>7</sup> Boy Anugerah, "Krisis Afghanistan dan Implikasi Terhadap Politik Global," *The American Political Science Review* 56, no. 3 (2022): 567–76.

<sup>8</sup> Rafika Wahyu Andani, "SEGITIGA KEKERASAN, HAM, DAN PEREMPUAN AFGHANISTAN ERA KEPEMIMPINAN TALIBAN," *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 1 (2022).

<sup>9</sup> Tsabitah Rizqi Ekanoviarini dan Aji Wibowo, "PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022): 715–28.

238-241 ribu jiwa<sup>10</sup>. Secara politis Taliban mempunyai tujuan agamis yang dijadikan alasan pembenaran atas gerakannya. Yaitu untuk mengaplikasikan interpretasi mereka tentang negara Islam dan penegakan hukum Islam di Afghanistan terbebas dari pengaruh negara Asing terlebih bayang-bayang AS dan sekutunya<sup>11</sup>. Tujuan tersebut menurut Muhammad Syarif Hasyim dan Randy Atma R Massi berbanding terbalik dengan realita kenyataannya. Kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa perjuangan Taliban dalam konflik yang berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun di Afghanistan merupakan gerakan non jihad. Hal ini terbukti berdasarkan kenyataan bahwa mereka hanya menginginkan pengakuan atas kekuasaannya<sup>12</sup>.

Beberapa temuan di atas, mempunyai dampak negatif terhadap citra Islam dan Muslim di mata dunia Internasional, terlebih dari negara barat dan sekutunya. Insiniasi Islam radikal, Islam teroris dan islamofobia merupakan konsekuensi logis yang akan muncul sebagai klaim negatif orang-orang di luar Islam terhadap agama Islam dan umatnya. Artinya, dalam hal ini tidak hanya Taliban dan Afghanistan yang akan terkena dampak negatif atas huru-hara dibalik rezim Taliban dan Afghanistan. Hal demikian merupakan keniscayaan yang lumrah terjadi. Mengingat, Taliban mengatasnamakan Islam sebagai ide gerakannya dan Afghanistan sebagai negara Islam yang gagal mewujudkan kemajuan dan peradaban disulut perang yang berkepanjangan.

Hal tersebut memunculkan kegelisan akademik dan menjadi latar belakang artikel ini hadir dengan mengangkat persoalan, apakah upaya praktik politik Taliban untuk menguasai Afghanistan sesuai dengan nilai politik Islam dan apakah gerakan politik Taliban sah dijadikan dasar asumsi untuk mengklaim bahwa ajaran Islam yang menjadi sumber konflik Afghanistan sehingga konflik Afghanistan bisa dijadikan justifikasi atau tuduhan Islam radikal, Islam teroris dan sikap Islamofobia terhadap Islam dan Muslim serta apa faktor yang menjadikan justifikasi tersebut menguat sehingga turut menyumbang citra negatif terhadap Islam di Afghanistan.

Kajian ini menjadi urgen untuk dilakukan, sebagai upaya mengungkap latar belakang dibalik dinamika konflik politik Afghanistan dan gerakan separatisme Taliban dalam menguasai Afghanistan. Mengingat posisi Afghanistan sebagai negara Islam

---

<sup>10</sup> Ahmad Faiz Ibnu Sani, "241 Ribu Orang Tewas Sejak Amerika Serikat Perangi Taliban," *Tempo.co*, 22 Agustus 2021, Eksklusif edisi, <https://dunia.tempo.co>.

<sup>11</sup> Kaiva Azria dan Erma Ramayani, "SEJARAH PERANG AFGHANISTAN DARI DULU HINGGA KINI," *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6, no. 2 (2022): 122–37.

<sup>12</sup> Muhammad Syarif Hasyim dan Randy Atma R Massi, "GERAKAN TALIBAN ANTARA JIHAD, MAKAR SERTA TRAGEDI KEMANUSIAAN DI AFGANISTAN," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 89–118.

dengan berbagai macam konfliknya, menjadikan Afghanistan tetap menjadi sorotan para peneliti Islam kawasan. Penulis juga telah melakukan beberapa telaah terhadap kajian-kajian ilmiah dari berbagai fokus kajian yang mempunyai kaitan dengan persolan dalam artikel ini. Seperti penelitian oleh Imam Mawardi, dkk (2022) tentang kekerasan berkedok agama dalam politik yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan melalui kaca mata teori Max Weber<sup>13</sup>. Muhammad Farih Fanani dan Adetia Andri (2021) mengkaji tentangn Afghanistan yang berfokus pada sejarah Islam dan Politik di Afghanistan khususnya perjuangan modernisasi dan demokratisasi di Afghanistan<sup>14</sup>. Ida Susilowati, dkk (2022) dengan fokus kajian kebijakan luar negeri Rusia khususnya dalam bidang ekonomi terhadap Afghanistan setelah pemerintahan dipegang kembali oleh Taliban<sup>15</sup>. Kesemuanya mengindikasikan penulis penting untuk melakukan penelitian ini.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disajikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode *desk research* dan *annotated bibliography*. *Desk research* studi kepustakaan *Desk research* adalah jenis penelitian yang didasarkan pada materi yang diterbitkan dalam laporan dan dokumen serupa yang tersedia di perpustakaan umum, situs web, data yang diperoleh dari survei yang telah dilakukan, dll. Beberapa organisasi juga menyimpan data yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian. adalah penelitian yang menggunakan data dari laporan ataupun dokumen hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam artikel ini. Data dalam artikel ini diperoleh melalui media massa, situs web, ataupun perpustakaan.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historiografi sejarah ilmu yang mempelajari metode penggambaran atau penulisan sejarah, seperti asal-usul, riwayat, atau pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Hal ini untuk mengetahui praktik politik yang berkembang di Afghanistan dari masa kemasa. Untuk mempertajam analisa dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi politik yang

---

<sup>13</sup> Imam Mawardi, Lutfirahman, dan Umi Nur Idayanti, "Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian," *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/12160>.

<sup>14</sup> Muhammad Farih Fanani dan Adetia Andri, "SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI AFGHANISTAN," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 212, no. 2 (2021), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/9681>.

<sup>15</sup> Ida Susilowati dkk., "Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (31 Maret 2022): 443–56, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788>.

<sup>16</sup> "Mengenal Desk Research: Definisi, Tips Beserta Contoh," *LP2M Universitas Medan Area* (blog), Desember 2021, [lp2m.uma.ac.id](http://lp2m.uma.ac.id).

membedah hubungan antara masyarakat sipil, aktor politik dan praktik politik serta kontribusinya terhadap sistem pemerintahan di suatu negara<sup>17</sup>.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Praktik Politik dalam Islam

Politik dalam Islam mempunyai definisi positif. Dalam catatan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah mengutip pandangan Ibnu ‘Aqil al-Hambali politik atau *al-Syiasah* dalam Islam fiqh didefinisikan sebagai;

ما كان من الأفعال، بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي.<sup>18</sup>

Al-syiasah (politik) adalah aktivitas atau sebuah kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh dari pada kerusakan meskipun hal tersebut tidak ada ketetapan dari Nabi dan tidak berdasarkan wahyu” dalam penetapannya. Imam al-Syafi’i berpandangan bahwa politik adalah bagian dari syari’at. Pandangan tersebut dapat dilihat dari statementnya yang dikutip oleh Syaikhul Islam Ali dan Lc M Sosio bahwa Al-Syafi’i menyatakan;

لا سياسة إلا ما وافق الشرع<sup>19</sup>.

*Tidak ada praktik politik (dapat dibenarkan) kecuali mencocoki ketentuan syari’at.*

Statement al-Syafi’i tersebut mempunyai penekanan pemenuhan dari nilai dan prinsip pengaplikasian praktik politik dalam Islam sebagaimana praktik politik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah. Menurut Katimin setidaknya terdapat empat cara yang dijadikan dasar oleh Nabi Muhammad dalam mengambil suatu kebijakan politik dalam praktik politik Islam. Pertama, medasarkan kebijakan dengan melakukan musyawarah bersama para tokoh sahabat. Kedua, meminta rekomendasi pertimbangan terhadap tenaga ahli yang profesional. Ketiga, melibatkan publik dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang mempunyai dampak luas dan keempat adakalanya Nabi mengambil keputusan secara independen berdasarkan bimbingan wahyu<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Keith Faulks, *Sosiologi Politik, Pengantar Kritis Ter. Helmi Mahadi* (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm. 1.

<sup>18</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *At-Turuq al-Hukmiyyah Fi Syiasati al-Syar’iyyah* (Jiddah: Majmu’ al-Fiqh al-Islami, 1428), hlm. 29.

<sup>19</sup> Syaikhul Islam Ali and Lc M Sosio, *KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Harakah Book, 2018), hlm. 14.

<sup>20</sup> Katimin, *POLITIK ISLAM: Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat*

Dalam praktiknya menurut Ahmad Irwan Hamzami Havis politik Islam berazaskan empat dasar azas yang termuat dalam Al-Qur'an. Azas pertama adalah azas keadilan dalam menegakkan hukum termuat dalam surah an-Nisa' ayat 58 dan 135, surah al-Maidah ayat 8, surah asy-Syura ayat 15. Kedua, azas musyawarah dalam menentukan kebijakan politik kenegaraan. Termuat dalam surah al-Syuura ayat 38 dan surah al-Imran ayat 159. Ketiga, azas *al-musawah* atau persamaan hak antar individu warga negara di mata hukum dan praktik politik penyelenggaraan negara. Keempat, azas kemerdekaan atau kebebasan "*al-hurriyyah*" dalam berkeyakinan surah al-Baqarah ayat 256<sup>21</sup>. Menurut Prof. Katimin dalam praktik politik Islam juga terdapat azas amanah dan azas ketaatan atau kepatuhan terhadap pemerintah yang digantungkan terhadap ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 58 dan an-Nisa' ayat 49<sup>22</sup>.

Dari sekian pemikiran politik dalam Islam yang paling menyita perhatian adalah hubungan Islam dan negara. Referensi yang representatif untuk dijadikan rujukan dalam menguraikan hubungan islam dan negara adalah jejak sejarah bagaimana Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, budaya dan politik masyarakat Madinah yang kemudian menjadikan Madinah sebagai negara Islam pertama dalam sejarah peradaban Islam<sup>23</sup>. Untuk mengintegrasikan Islam sebagai agama dan Madinah sebagai wadah negara yang dihuni oleh berbagai suku atau kabilah pada saat itu, Nabi Muhammad menetapkan piagam Madinah sebagai undang-undang tertulis pertama dalam sejarah Islam<sup>24</sup>. Piagam Madinah ditetapkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan kesepakatan bersama dengan semua elemen masyarakat Madinah. Karenanya kedudukan piagam Madinah sangat urgen dalam mengatur hubungan antara kepentingan Islam dan kepentingan Madinah sebagai negara yang tidak hanya diduduki oleh orang Islam. Jika ditinjau dari teori konstitusi dalam diskursus ilmu hukum hari ini piagam Madinah dapat dikategorikan sebagai konstitusi negara seperti halnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia<sup>25</sup>.

Menurut Abd. Mannan, ditinjau dari sejarah peradaban manusia, hubungan agama

---

*Islam*, vol. 1 (Perdana Publishing, 2017), hlm 58-59.

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran* (Penerbit NEM, 2021), hlm. 11-21.

<sup>22</sup> Katimin, *POLITIK ISLAM: Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, hlm 9-11.

<sup>23</sup> Jufri Suyuthi Pulungan, "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an," *Intizar* 24, no. 1 (2018): 185–202.

<sup>24</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (UI press, 1990), hlm. 10.

<sup>25</sup> Salma Mursyid, "Piagam Madinah Dan UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2016).

dan negara di satu sisi telah melahirkan kemajuan dan peradaban besar meskipun di sisi lain juga menimbulkan malapetaka besar dalam pergulatan idealisme keduanya<sup>26</sup>. Hubungan antara Islam dan negara melahirkan dua karakteristik paradigma pemikiran dalam tinjauan politik Islam. Pertama, paradigma struktural yang merupakan konsepsi pemikiran yang terlahir dari para ulama yang secara langsung berada di lingkungan pemerintah “negarawan” dan mempunyai peranan dalam struktur kenegaraan. Seperti, Imam al-Mawardi, Ibnu Khaldun dan Syihabuddin Ibnu Abi Rabi’. Kedua, paradigma non struktural. Paradigma ini adalah pemikiran politik dari para tokoh ulama di luar struktur kekuasaan, seperti Ibnu Taimiyyah, Imam al-Ghazali dan al-Farabi<sup>27</sup>.

Dua paradigma pemikiran politik di atas memiliki kesamaan pandangan dalam hal pendirian suatu negara yang berasaskan nilai-nilai keislaman. Ibnu Abi Rabi’ berpandangan bahwa pembentukan negara dan pemerintahan Islam menurutnya wajib berdasarkan dalil *naqli* dan *‘aqli*,<sup>28</sup> Ibnu Khaldun dan al-Mawardi kurang lebih juga berpandangan demikian, bahwa khilafah atau imamah merupakan keharusan “wajib” berdasarkan tuntutan syari’ah dan logika *ijmaul ummah*<sup>29</sup>. Landasan filosofis dari pandangan ini merujuk kepada ayat 165 dalam surah al-‘An’am dan ayat 59 surah an-Nisa’. Begitupula al-Ghazali. Menurutnya agama dan negara tidak boleh dipisahkan. Agama sebagai pondasi negara sedangkan pemerintahan adalah penjaganya. Penegasan dari pandangan tersebut ialah pemerintahan yang syar’i wajib ada. Karena agama sebagai pondasi negara akan hilang tanpa adanya penjaga<sup>30</sup>. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya yang meniscayakan keharusan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan agama terhadap dunia. Kemaslahatan tersebut didistribusikan melalui praktik politik dalam Islam dengan mengatur kehidupan warga negara, mengimplementasikan hukum dan undang-undang negara serta membentuk tentara negara untuk melindungi kepentingan negara dan menumpas hegemoni penjajahan<sup>31</sup>.

### **Sejarah Perkembangan Islam di Afghanistan dan Kemunculan Taliban**

Hari ini Afghanistan menjadi model bentuk masyarakat Islam. Islam dengan persentase 90% atau 84,7-89,7% berafiliasi Islam Sunni, 10-15% dari jumlah populasi

---

<sup>26</sup> Abd Mannan, “Islam dan Negara,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014).

<sup>27</sup> Sirojuddin Aly, “Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan),” 2018.

<sup>28</sup> Ibn Abi Rabi, *Suluk Al-Malik Fi Tadbir al-Mamalik* (Kairo: Dar al-Sya’ab, 1970), hlm. 32-34.

<sup>29</sup> Muhammad bin Khaldun and Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 390.; Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar Al-Fikr, t,th), hlm. 5.

<sup>30</sup> AS Anwar Sanusi, *Pemikiran Politik Islam* (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021), hlm. 77.

<sup>31</sup> Sauqi ’Allam, *Qadhaya Fiqhu Ad-Daulah* (Mesir: Dar al-Ifta’ Misriyyah, 2021), hlm 236.

berafiliasi Islam Syiah dan 0,3% sisanya terdiri dari agama minoritas.<sup>32</sup> Bahkan menurut Thomas Barfield dalam bukunya hampir tidak ada tempat bagi agama selain Islam. Menurutnya Afghanistan dipenuhi oleh Sunni hingga 85 % dan 15 % diisi oleh Syiah Ismailiyah. Afghanistan dengan keislamannya hari ini menjadi pembicaran dan sorotan politik internasional. Namun disayangkan perhatian Afghanistan hari ini terkurung pada politik yang berkedok Islam.<sup>33</sup>

Islam dan islamisasi di Afghanistan termuat dalam kurun waktu yang panjang. Sekitar tahun 650 M, Afghanistan dikuasai oleh Dinasti Sasan Iran yang menganut agama Majusi atau zoroastrianisme, berhasil dikalahkan oleh invasi yang dilakukan oleh tentara Muslim Arab. Shah Yazdagird III, pemimpin terakhir Dinasti Sasan saat itu berhasil dikalahkan dan terbunuh di sekitar Bala Murghab. Muslim Arab yang berhasil mengalahkan Dinasti Sasan mendirikan tenda-tenda tempat tinggal di sekitar Herat, Maimana, dan Balkh. Berdirinya barak-barak tentara Muslim Arab tidak menandakan Islam di Afghanistan saat itu berkembang dengan pesat. Islam saat itu penyebarannya terbatas sekitar pusat-pusat perkotaan. Kabul pernah dikuasi Islam pada tahun 642 M, namun berhasil direbut kembali oleh Turki Shasi, dan baru diislamkan kembali sekitar abad ke-11 oleh Sultan Mahmud pada masa Dinasti Ghaznawiyah. Hal ini menjadi tanda Islam saat itu tidak berkembang secara cepat di Afghanistan<sup>34</sup>

**Tabel 1**  
**Dinasti Islam di Afghanistan**

Dinasti	Tahun Pemerintahan	Ibu Kota	Wilayah Pemerintahan	Etnis
Umayyah	664-750	Damaskus	Afghanistan barat, utara, dan barat daya	Muslim, Arab
Abbasiyah	750-870	Kufah, kemudian Baghdad	Sejak tahun 819 Abbasiyah menyerahkan otonomi kekuasaannya pada muslim di Afghanistan	Sunni, Muslim, Arab
Samaniyah	819-992	Samarkhan kemudian Bukhara	Diawali daerah Herat, Balkh, kemudian seluruh wilayah Afghanistan	Samanisme yang beralih ke Muslim Sunni
Safariyah	857-901	Zaranj	Sistan, Herat, Balkh, Badghis, Ghor, Bamiyan	Muslim Sunni
Ghaznawiyah	977-1186	Ghazni	Seluruh Afghanistan, Iran bagian timur, dan India bagian Utara	Muslim Sunni
Seljuk	1036-1157	Rey kemudian Isfahan	Balkh, Herat, Ghazni	Samanisme yang beralih ke

<sup>32</sup> Bell James, *The World's Muslims: Unity and Diversity* Pew Research Center, 2016.

<sup>33</sup> Thomas J. Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History*, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2010), 40.

<sup>34</sup> Jonathan L Lee, *Afghanistan A History From 1260 to The Present*, 1 ed. (London: Reaktion Books LTD, 2018), 32.

				Muslim Sunni
Ghuriyah	1187-1215	Awalnya Firoz Koh kemudian Herat	Ghar, Bamiyan, Herat, Ghazni	Muslim Sunni
Khwarezmia Shah	1194-1223	Jurjaniyah, kemudian Samarkhan, Ghazni, Tabriz	Sebagian besar Afghanistan	Muslim Sunni
Ikhanat	1256-1333	Maragha kemudian Tabriz	Herat, Balkh, Zaranj, Kandahar	Samanisme beralih ke Muslim Sunni
Timuriyah	1370-1507	Balkh kemudian Samarkhan dan Herat	Herat, Balkh, Kandahar, Kabul	Muslim Sunni, dan Sufisme
Shaibaniyah	1428-1599	Bukhara	Balkh, Afghanistan bagian Utara	Muslim Sunni
Tuqay-Timuriyah	1599-1785	Bukhara	Afghanistan bagian Utara	Muslim Sunni
Safavid	1501-1722	Isfahan	Herat, Kandahar	Muslim Syiah
Mughal	1526-1858	Kabul kemudian Delhi	Kabul, Ghazni, Nagahar, Kandahar	Muslim Sunni

Sumber: *Afghanistan A History From 1260 to The Present*<sup>35</sup>

Sekitar tahun 1920, undang-undang hukum di Afghanistan mendapat pengaruh besar dari yurisprudensi Hanafi, sekolah-sekolah hukum dengan madzhab Sunni. Konstitusi negara ini menjadi Republik Islam pada tahun 2004. Mayoritas penduduknya menganut Sunni namun tidak dapat dipungkiri Syiah dan Ismailiyah juga berkembang di Afghanistan meskipun sebagai minoritas. Sebagian besar masyarakat Afghanistan merupakan penduduk yang sangat religius dan mempraktikkan Islam dalam keseharian. Meskipun masyarakatnya sangat monoteistik, Islam yang berkembang di Afghanistan sangat jauh dari monolitik. Keberagaman pemahaman dan aliran dalam memahami Islam muncul dan berkembang di Afghanistan, mulai dari Rasionalisme Deistik hingga kelompok Gerakan Eksklusivisme Puritan seperti Taliban.<sup>36</sup>

Taliban diidentifikasi keberadaannya bersama para mujahidin sekitar tahun 1980-an di wilayah Afghanistan Selatan. Keberadaan Taliban tahun 1980-an dianggap sebagai bagian dari pra-sejarah keberadaan Gerakan Taliban, karena gerakan ini dianggap pertama kali muncul dan dibentuk oleh Pakistan pada tahun 1994.<sup>37</sup> Seperti dalam penelitian Durrotun Nafisah menyatakan, Taliban secara resmi dibentuk oleh Mullah Muhammad Oman pada 1994.<sup>38</sup> Taliban dalam pergerakannya, meskipun hadir di sekeliling mujahidin tidak pernah berjalan beriringan dengan mujahidin lainnya. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang dimiliki oleh gerakan ini dan target atau objek mereka

<sup>35</sup> Lee, *Afghanistan A History From 1260 to The Present*, 33-34.

<sup>36</sup> Lee, 34.

<sup>37</sup> ‘Abd al-Salām Za‘īf, Alex Strick van Linschoten, dan Felix Kuehn, *My life with the Taliban* (New York: Columbia University Press, 2010), xvii.

<sup>38</sup> Durrotun Nafisah, “Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 49.

yang berbeda. Menurut pernyataan dari Partai Mahaz e-Milli dan Jamiat Islam Rabbani, Taliban merupakan gerakan yang sangat ketat dalam aturan milik mereka, juga penentang<sup>39</sup> Amerika Serikat yang bersaing dengan Taliban menjadi bukti keras dan ketatnya gerakan ini. Taliban lahir didasari oleh kondisi politik saat itu yang saling berkeinginan untuk memimpin Afghanistan.<sup>40</sup>

Perang antar Fraksi Mujahidin dalam memperebutkan kekuasaan menjadikan mereka bertindak semena-mena, hal ini juga yang menjadi salah satu lahirnya Taliban. Pada awal kemunculannya, Taliban merupakan sebuah gerakan yang beranggotakan para pelajar, khususnya mahasiswa Pashtun. Mereka banyak berasal dari wilayah selatan Helmand dan Kandahar Afghanistan dan juga Pakistan Barat Laut. Melihat kondisi Afghanistan yang porak-poranda dengan pemerintahan yang tidak berhasil membawa kedamaian dan malah menyebabkan pertikaian antar pemerintah, melahirkan tujuan utama Taliban untuk mengembalikan Afghanistan sebagai negara yang berpegang pada hukum Islam. Mereka memaksakan kesetiaan yang ketak terhadap hukum Islam. Oleh karena itu mereka berusaha mewujudkan tujuan utama dengan melakukan politik atas nama agama. Gerakan mereka membuahkan hasil dengan menguasai Kabul pada tahun 1996 dan mengukuhkan Afghanistan sebagai Imarah Islam Afghanistan. Empat tahun kemudian mereka berhasil melebarkan sayap kekuasaan hingga 95% negara Afghanistan berada dibawah kekuasaan rezim Taliban.<sup>41</sup>

Meskipun memiliki tujuan awal yang mulia untuk mengembalikan Afghanistan kepada tata cara kehidupan yang bersandarkan aturan Islam. Dalam perkembangannya Taliban tidak lebih baik dari kelompok Mujahidin. Awal pergerakan Taliban dilakukan dengan tanpa pertumpahan darah. Namun pada beberapa tahun kemudian Mohammad Najibullah menjadi awal anarkisme kelompok Taliban. Dengan alasan menegakkan hukum Islam dan membentuk negara Islam, Taliban tidak ragu untuk memusnahkan di ruang public siapa saja yang mencoba menghentikannya. Seorang wartawan Wanita asal Inggris menulis pengalamannya di tahun 2001 ketika ia secara sembunyi-sembunyi mengunjungi Afghanistan. Ia berhasil mewawancarai beberapa perempuan Afghanistan dan menemukan kesimpulan. Selama dalam kepemimpinan Taliban hak-hak perempuan

---

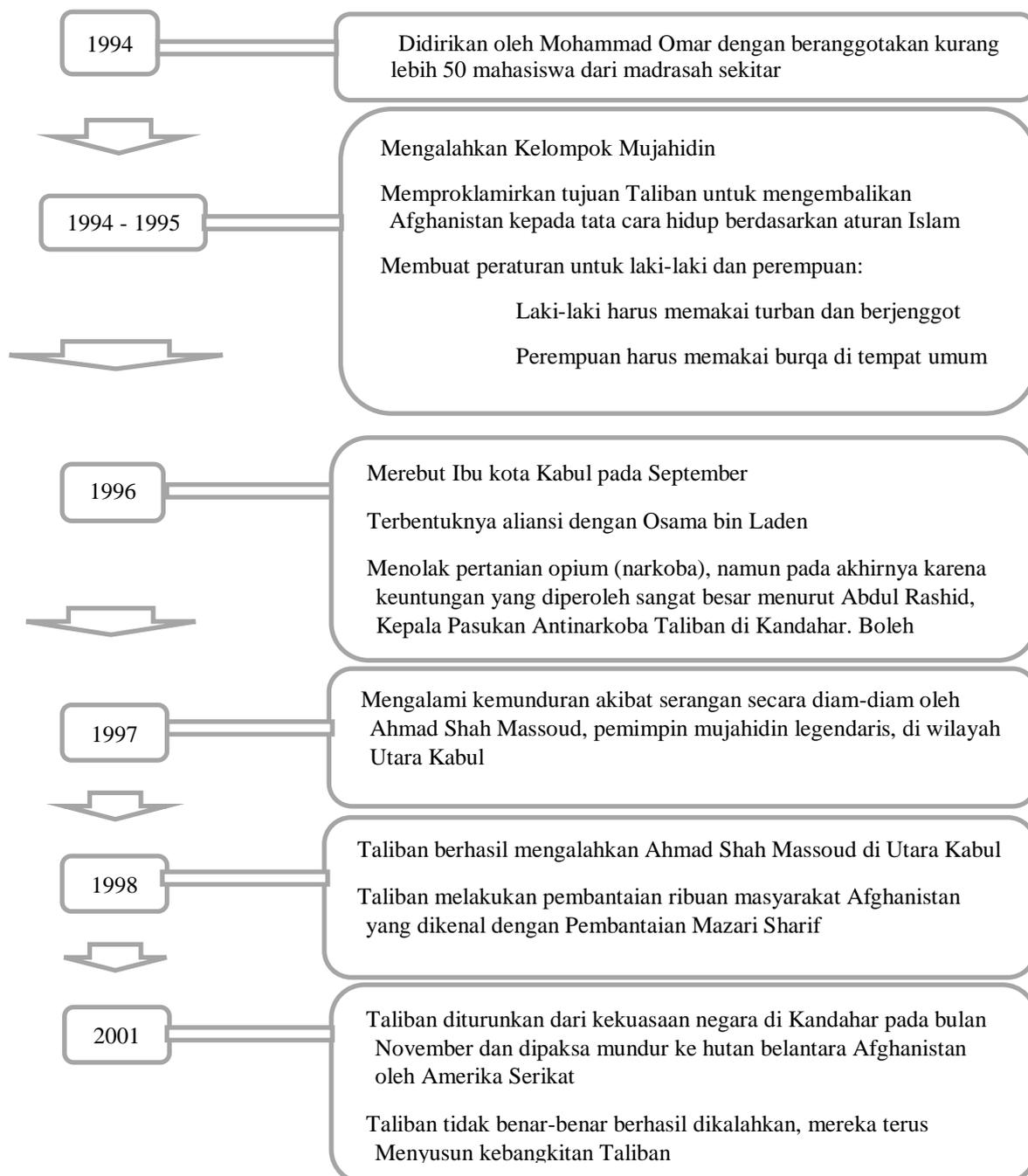
<sup>39</sup> Za'if, Strick van Linschoten, dan Kuehn, *My life with the Taliban*, xviii.

<sup>40</sup> Mawardi, Lutfirahman, dan Idayanti, "Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian," 40.

<sup>41</sup> Meredith L. Runion, *The history of Afghanistan*, The Greenwood histories of the modern nations (Westport, Conn: Greenwood Press, 2007), 120.

dikesampingkan, dengan alasan melindungi perempuan. Kaum wanita yang sedang menempuh pendidikan harus berhenti dan menutup rapat-rapat harapan mereka karena sekolah khusus perempuan pada waktu itu ditutup.<sup>42</sup> Pada tahun 1996-2001 bahkan dikenal sebagai era tergelap dalam sejarah Afghanistan yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Taliban.<sup>43</sup>

### **Bagan 1** **Pergerakan Taliban Tahun 1994-2001**



<sup>42</sup> Yvonne Ridley, *In the Hands of the Taliban: Her Extraordinary Story* (London: Robson Books, 2001), 96–97.

<sup>43</sup> Runion, *The history of Afghanistan*, 2007, 122–28.

Setelah Taliban berhasil dipukul mundur pada 2001, kekuasaan di Afghanistan digantikan dan dipimpin untuk sementara oleh Hamid Karzai salah satu pendukung paham komunisme etnis Pashun. Kepemimpinan Hamid Karzai tidak membuat Taliban berhenti berjuang. Pada 2003 Mullah Dadullah pemimpin Taliban di Afghanistan Selatan berhasil merebut distrik Dai Chopan di Zabul dan sebagian Provinsi Paktika. Uruzgan dan Provinsi Kandal pada 2004 juga telah memperlihatkan adanya kegiatan oleh Taliban. Pada 2005-2006 Taliban mulai memfokuskan kebangkitannya di wilayah Helmand, Ghazni, Paktya, Khost, Lowgar, dan Farah. Taliban yakin dapat menguasai bagian selatan Afghanistan pada 2006. Sejak 2003-2006 Taliban berfokus pada pengadaan senjata dan pasukan, sehingga belum ada pelatihan yang dilakukannya. Meskipun tidak ada pelatihan militer yang dilakukan, Taliban tetap melakukan serangan secara klasik. Namun karena masih terbatasnya perlengkapan dan senjata serangan secara klasik untuk mengalahkan tantara AS tidak berhasil. Oleh karena itu mereka mulai melakukan pergerakan dengan melakukan bom bunuh diri<sup>44</sup>.

Pada 2007 Taliban kembali berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di Afghanistan, sedangkan kestabilan negara belum benar-benar terselesaikan. Permasalahan yang kompleks baik ekonomi, sosial, kesehatan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Tahun 2008 Taliban melakukan gerakan baru yaitu memperluas wilayah hingga ke utara dan barat hingga mampu menguasai sepuluh persen dari wilayah Afghanistan<sup>45</sup>. Mereka juga gencar melakukan strategi pembunuhan terhadap siapa saja yang mencoba menggagalkan ekspansi mereka<sup>46</sup>. Namun Amerika Serikat juga tidak diam terhadap pergerakan Taliban, Presiden Barak Obama di tahun 2008 menetapkan dekrit untuk lebih cepat mengirimkan pasukan militer AS ke Afghanistan<sup>47</sup>.

Taliban semakin kuat dalam menguasai Afghanistan. Pada 2017 seluruh anggota militer Amerika Serikat diminta untuk mundur dan meninggalkan Afghanistan oleh Taliban. Penjanjian damai antara keduanya kem

Taliban diturunkan dari kekuasaan negara di Kandahar pada bulan November dan dipaksa mundur ke hutan belantara Afghanistan oleh Amerika Serikat

Taliban tidak benar-benar berhasil dikalahkan, mereka terus Menyusun kebangkitan Taliban

<sup>44</sup> Alex Strick van Linschoten dan Felix Kuehn, *An enemy merger in Afghanistan* (Oxford ; New York: Oxford Unive

<sup>45</sup> Ahmad Musta'id, "Sejarah Islam dan Politik Afghani Pendidikan 6, no. 2 (29 Desember 2022): 220, <https://doi.org>

<sup>46</sup> Strick van Linschoten dan Kuehn, *An enemy we created*, 317–20.

<sup>47</sup> Kaiva Azria dan Erma Ramayani, "SEJARAH PERANG AFGHANISTAN DARI DULU HINGGA KINI," *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6, no. 2 (17 Februari 2022): 131, <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137>.

pada Desember 2019 ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Taliban dan Amerika Serikat akhirnya menandatangani perjanjian damai untuk Afghanistan pada Februari 2020. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Asraf Ghani menandatangani perjanjian tentang pembagian wilayah Afghanistan dengan Taliban pada Maret 2021<sup>48</sup>. Perjanjian ini adalah babak baru bagi Taliban untuk menguasai Afghanistan seutuhnya.

### **Praktik Politik di Afghanistan**

Afghanistan adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim yang rentan terjadi konflik, bahkan disebut negara rawan konflik kedua dari bawah<sup>49</sup>. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa praktik perjalanan politik di Afghanistan sangat dilematis. Sebagian sumber menyebutkan konflik tersebut dilatar belakangi oleh konflik internal antara kelompok taliban dan pemerintah Afghanistan, ada pula yang menyimpulkan bahwa konflik di Afghanistan diakibatkan oleh demokratisasi yang gagal yang disebabkan oleh perbedaan preferensi antar elit politik dalam upaya instalasi demokrasi untuk mencapai perdamaian<sup>50</sup>. Disisi lain ada yang memandang bahwa cikal bakal terjadinya konflik di Afghanistan adalah dampak dari pergulakan antara ideologi komunisme dan islamisme sebagai ideologi negara yang didominasi antara pengaruh uni Soviet dan para mujahid Afghanistan<sup>51</sup>. Namun apapun latarbelakang terjadinya konflik yang terjadi di Afghanistan dapat ditelaah lebih lanjut melalui bagaimana sebenarnya realita praktik politik yang terjadi di Afghanistan. Hal ini menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut mengingat sampai saat ini menurut hasil studi MPR RI dan Lemhannas RI instabilitas keamanan dan politik di Afghanistan diprediksikan akan berlangsung dalam waktu yang lama dimana hal tersebut akan mempengaruhi secara signifikan terhadap geopolitik dunia internasional<sup>52</sup>.

Sampai saat ini gemelut pasang surut konflik Afganistan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih baik. Jika ditarik kebelakang praktik politik perebutan kekuasaan di Afghanistan tidak terlepas dari bayang-bayang politik kekerasan atas nama agama dan hegemoni sekaligus intervensi pengaruh Uni Soviet dan AS di sisi lain. Tercatat sejak tahun 1978 ekspansi yang dilakukan oleh Uni Soviet sampai 2021 pasca

---

<sup>48</sup> Susilowati dkk., "Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021," 448.

<sup>49</sup> Muhammad Farih Fanani dan Adetia Andri, "Sejarah Islam dan Politik di Afghanistan," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 2 (2021): 91–112.

<sup>50</sup> Irza Khurunâ, "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan," *Transformasi Global* 3, no. 1 (2016).

<sup>51</sup> Al-Ghifari, "Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)."

<sup>52</sup> Boy Anugerah dan Jabinson Purba, "Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 13–34.

penarikan tentara AS yang menjadi babak baru untuk kedua kalinya Afghanistan dikuasai oleh kelompok Taliban pada 14 Agustus 2021<sup>53</sup>.

Tidak cukup mengalami gejolak politik dengan rezim pemerintahannya sendiri. Afghanistan di tahun yang sama (1978) dengan penggulingan Presiden Muhammad Daud Khan juga mengalami invensi Uni Soviet.<sup>54</sup> Jika ditelusuri lebih lanjut, Daud Khan sendiri merupakan pemimpin Afghanistan yang mengukudeta pemerintahan Muhammad Zahir Shah Pada 17 Juli 1973 dan mendeklarasikan Afghanistan sebagai negara republik yang sebelumnya berbentuk monarki absolut. Pada 27 April 1978, Muhammad Daud Khan terbunuh dalam suatu kudeta yang menjadikan Afghanistan sebagai pemerintahan komunis di bawah kepemimpinan Nur Mohammad Taraki sebagai presiden sekaligus perdana menteri Afghanistan dari tahun 1978-1979<sup>55</sup>. Taraki merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan (PDPA), sebuah partai Marxis yang memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet<sup>56</sup>.

Pada 14 September 1979 Nur Mohammad Taraki dikudeta oleh Hafizullah Amin yang merupakan wakil perdana mentrinya sendiri. Tiga bulan dari kudeta yang dilakukan oleh Amin tersebut, tepatnya pada 24 Desember 1979 Uni Soviet melayangkan serangan terhadap kelompok Mujahidin. Mereka menyerang kelompok Mujahidin yang hampir tidak memiliki peralatan militer seperti tank baja, dan senapan. Pada 27 Desember 1978 Soviet yang hampir menguasai seluruh Afghanistan, menduduki rumah kepresidenan dan berhasil menggulingkan pemerintahan Hafizullah Amin yang berujung pembunuhan terhadap semua anggota keluarganya<sup>57</sup>. Menurut sebagian sumber, Hafizullah Amin dibunuh kerana pandangan nasionalis dan upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Pakistan dan Amerika Serikat, hal inilah yang menjadikan Uni Soviet bersikap tegas kepadanya<sup>58</sup>. Setelah Hafizullah Amin pemerintahan Afghanistan dilanjutkan dengan pendeklarasian Babrak Karmal dengan dukungan penuh dari Uni Soviet sebagai presiden berikutnya, beberapa hari setelah terbunuhnya Amin. Soviet terus menyerang Afghanistan sehingga pada tahun 1984 tercatat penduduk Afghanistan hingga 4 juta

---

<sup>53</sup> Arif Sumantri Harahap, *Invisible Diplomacy: The Untold Story Behind The Career of An Indonesian Diplomat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. xx.

<sup>54</sup> Musta'id, "Sejarah Islam dan Politik Afghanistan," 218.

<sup>55</sup> T Britannica, "Mohammad Daud Khan,," *Argon. Encyclopedia Britannica*, 2020, <https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Daud-Khan>.

<sup>56</sup> T. Editors Britannica, "Nur Mohammad Taraki prime minister of Afghanistan" (Inggris: Encyclopedia Britannica), diakses 22 Maret 2023, <https://www.britannica.com/biography/Nur-Mohammad-Taraki>.

<sup>57</sup> David B. Edwards, *'Before Taliban: Genealogis of the Afghan Jihad'* (California Press,: University of California Press, 2022), 376.

<sup>58</sup> Mawardi, Lutfirahman, dan Idayanti, "Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian."

melakukan pengungsian ke Pakistan. Sedangkan Iran menerima hingga 2 juta pengungsian dari Afghanistan.<sup>59</sup>

Uni soviet menduduki Afghanistan hingga tahun 1989. Menurut Runion dalam bukunya, ironinya keberadaan Uni Soviet di Afghanistan merupakan permintaan rezim pemerintah saat itu, untuk membantu mereka meredam pemberontakan oleh kelompok mujahidin. Menurutnya, awalnya Hafizullah Amin, presiden ke-2 Republik Demokratis Afghanistan merupakan salah satu pihak yang meminta bantuan Uni Soviet begitu juga dengan presiden ke-3, Babrak Karmal<sup>60</sup>.

Babrak Karmal menjabat sebagai presiden Afghanistan sejak 1979 dan resmi mengundurkan diri pada tahun 1986 karena alasan kesehatan. Kepemerintah Afghanistan selanjutnya dilanjutkan oleh Mohammad Najibullah (mantan polisi senior Afghanistan yang dikenal sangat brutal dan kejam). Pada 1978 Najibullah pernah menjabat sebagai duta besar Afghanistan di Iran, namun tidak lama ia dipecat karena dituduh berupaya meng kudeta Hafizullah Amin. Setelah Uni Soviet menarik diri dari Afghanistan, pada tahun 1992 Najibullah dipaksa mundur oleh kelompok pemberontak Mujahidin dan pemberontak di dalam militernya sendiri. Keadaan yang tidak kondusif membuat Najibullah harus mengungsi dan bersembunyi selama empat tahun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Taliban. Pada tahun 1996 Taliban mengambil alih kota Kabul dan menjadi tanda akhirnya masa kepemimpinan Najibullah<sup>61</sup>.

Gerakan perlawanan terhadap Uni Soviet terus dilakukan oleh kelompok militan Afghanistan yang terafiliasi dalam gerakan kelompok Mujahidin, Mujahidin terus melakukan pergerakan untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Pada akhir 1980-an Amerika Serikat secara diam-diam memberikan bantuan militer kepada Mujahidin melalui Pakistan untuk mengalahkan Uni Soviet.<sup>62</sup> Tanpa disadari selama kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun Uni Soviet melakukan invasi terhadap Afghanistan, mereka juga mengalami kerugian yang besar seperti banyaknya jumlah korban dan luka-luka dari kalangan komunis ini. Namun mereka menyembunyikannya. Serta rendahnya dukungan negara lain terhadap invasinya ke Afghanistan, menyebabkan pada akhir 1985 Mikhail Gorbachev pemimpin baru Uni Soviet mencari cara untuk memenangkan peperangan atau mundur secara perlahan dari Afghanistan. Hingga pada tahun 1989 menurut

---

<sup>59</sup> Runion, *The history of Afghanistan*, 2007, 110–15.

<sup>60</sup> Meredith L Runion, *The history of Afghanistan* (ABC-CLIO, 2017).

<sup>61</sup> Noah Tesch, "Najibullah president of Afghanistan," Article History (Encyclopedia Britannica, 1 Januari 2023), <https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Najibullah>.

<sup>62</sup> A. Z. Hilali, *US-Pakistan relationship: Soviet invasion of Afghanistan*, US foreign policy and conflict in the Islamic world (Burlington, VT: Ashgate, 2005), 6.

Jonathan L Lee dalam pernyataannya lebih dari 14.000 tentara soviet dan warga sipil tewas serta 50.000 luka-luka. Uni Soviet menarik kekuatannya untuk mundur dari Afghanistan pada Februari 1989.<sup>63</sup>

Pimpinan Taliban yang kemudian mengambil alih kepemimpinan Afghanistan dari yang mulanya berbentuk Presiden menjadi emir Afghanistan adalah Muhammad Umar. Hal ini menandakan bahwa Umar merubah status Afghanistan yang awalnya berbentuk Republik Islam Afghanistan dimasa rezim Taliban berubah menjadi Keamiran Islam Afghanistan, dibawah kepemimpinan Muhammad Umar Taliban berkuasa selama lima tahun (1996-2001)<sup>64</sup>. Pada 7 Oktober 2001 George W Bush Presiden AS mengirimkan 1.300 pasukan perang ke Afghanistan sebagai jawaban atas tragedi 11 September di *World Trade Center* (WTC) yang menewaskan kurang lebih 3000 warga AS. Tragedi tersebut yang dijadikan dalih oleh AS untuk menyerang Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban yang diduga melindungi kelompok Al-Qaeda<sup>65</sup>.

Seperti halnya Uni Soviet, pasca runtuhnya rezim Taliban pada pertengahan November, AS pada akhir desember juga mengangkat Hamid Karzai sebagai ketua pemerintah sementara, hal ini dilakukan untuk menghindari perebutan kekuasaan setelah runtuhnya Taliban. Hamid Karzai baru resmi ditetapkan sebagai presiden Afghanistan pada bulan Juni 2002. Di bawah kepemimpinan Hamid Karzai ini Afghanistan berubah kembali menjadi negara republik Islam dengan sistem demokrasi. Hal ini terbukti dengan disetujuinya konstitusi baru yang menetapkan bahwa presiden harus dipilih langsung oleh warga Afghanistan dan pada 2004 resmi diadakan pemilu pertama dalam sejarah Afghanistan yang dimenangkan oleh kubu Hamid Karzai<sup>66</sup>. Pemerintahan Hamid Karzai berjalan selama 10 tahun (2004-2014). Pada era Hamid Karzai, hubungan Afghanistan dan Amerika kembali harmoni, Afghanistan dan Amerika banyak menjalin kerjasama dan kemitraan strategis. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari peran Amerika dibalik keberhasilan Hamid Karzai menjadi orang nomor satu Afghanistan<sup>67</sup>.

Setelah Hamid Karzai selesai menjabat sebagai presiden Afghanistan. Pada tahun 2014 diadakan pemilu kembali untuk memilih presiden yang baru. Muncullah Ashraf

---

<sup>63</sup> Lee, *Afghanistan A History From 1260 to The Present*, 617.

<sup>64</sup> Syarif Yahya, *Kamus Sejarah Agama Islam: Nama, Kronologi, Peristiwa Syarif Yahya* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023), hlm. 133.

<sup>65</sup> Aditya Jaya Iswara, "Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan," *Kompas.com*, 31 Agustus 2021, <https://internasional.kompas.com>.

<sup>66</sup> "Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, December 20). Hamid Karzai. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Hamid-Karzai>," t.t., diakses 24 April 2023.

<sup>67</sup> Fi Pratiwi, "Kerjasama Kemitraan Strategis Afghanistan Dengan Amerika Serikat dibawah Kepemimpinan Hamid Karzai Pada Tahun 2012," 2013.

Ghani dan Abdullah sebagai kandidat pada pemilu tersebut. Pemilihan presiden tersebut tampaknya tidak berjalan lancar, kedua kandidat tersebut sama-sama mengklaim kemenangan, hingga berujung kebuntuan. Pada bulan Juli, di bawah tekanan dari Amerika Serikat, kedua belah pihak pada prinsipnya setuju untuk menerima hasil audit pemungutan suara yang diawasi secara internasional dan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di mana pemenang akan menduduki posisi presiden. Pada tanggal 21 September Ghani dan Abdullah sepakat menandatangani perjanjian konsolidasi yang menetapkan Ghani sebagai presiden dan Abdullah diposisi lainnya seperti perdana menteri atau kepala eksekutif. Keadaan demokrasi Afghanistan mengalami ketegangan yang mengarah kepada terjadinya perselisihan antar etnis, meskipun tekanan Amerika membuahkan hasil kesepakatan tersebut<sup>68</sup>.

Alotnya pemilihan Presiden tersebut, memicu penolakan dan pemberontakan kelompok Taliban semakin menemukan momentumnya. Terbukti dimasa pemerintahan Ashraf Ghani keamanan dan stabilitas politik Afghanistan masih sangat mengkhawatirkan dan tidak aman<sup>69</sup>. Taliban terus melakukan tekanan terhadap kepemimpinan Ashraf Ghani di bawah dukungan Amerika Serikat. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil perjanjian damai antara Amerika Serikat dan kelompok Taliban di Doha, Qatar, pada 29 Februari 2020<sup>70</sup>. Perjanjian damai tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Ashraf Ghani sudah mulai melemah terlebih setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik militernya dari Afghanistan pada akhir Agustus 2021 yang juga menjadi sebab Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan<sup>71</sup>. Menurut Ali Zhafir Talmullah, kesepakatan damai antara AS dan Taliban di Doha tersebut menguntungkan pihak Taliban dan melemahkan posisi Ashraf Ghani karena menjadi batu loncatan Taliban mengkuadeta Ashraf Ghani pada 15 Agustus 2021<sup>72</sup>.

Dibalik keputusan AS menarik pasukannya dari Afghanistan memunculkan pertanyaan besar. Lantas, apa sebenarnya tujuan AS selama 20 Tahun mengekspansi Afghanistan? Pertanyaan ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa 11 September 2001 yang

---

<sup>68</sup> Vitaly V Naumkin, "The future of Afghanistan after elections: Predictable uncertainty," *future*, 2014.

<sup>69</sup> Rahima Bibi, "Legitimasi Politik Pemerintahan Asraf Gani Di Afghanistan," 2018.

<sup>70</sup> Safna Putri Purba, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya, "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump," *Journal of International Relations* 8, no. 3 (2022): 346–56.

<sup>71</sup> Khotibul Umam, "Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021," vol. 1, 2022, 257–66.

<sup>72</sup> Ali Zhafir Talmullah Zhafir, "Realisasi Perjanjian Perdamaian DOHA Dialogue antara Afghanistan-Amerika Serikat dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 2, no. 2 (2022): 94–104.

memainkan peranan penting dalam hubungan Afghanistan dan AS. karena setelah itu, Afghanistan menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri AS. Kehadiran militer AS di Afghanistan memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan yang paling masuk akal menurut Hafiza Khurami Afghanistan adalah alat bagi Amerika Serikat untuk mencapai tujuan ideologisnya, salah satu alasannya adalah perjuangan melawan Islam. karena negara-negara Timur Tengah adalah tempat lahirnya Islam. Dan Amerika Serikat menganggap negara-negara tersebut sebagai sumber terorisme, yang merupakan musuh Amerika Serikat. Guna mencapai tujuan dan ambisi politiknya AS mendirikan pangkalan militer di Afghanistan di bawah pengaruh kekuatan seperti Rusia, China dan Iran. Kedekatan Afghanistan dengan Timur Tengah dan Asia Tengah, yang kaya akan sumber daya Alam seperti minyak dan gas, juga menjadi alasan penting bagi AS secara ekonomi. Karenanya posisi geopolitik Afghanistan dipandang bisa menjadi landasan yang baik untuk mencapai tujuan AS tersebut<sup>73</sup>.

Apa yang dikemukakan oleh Hafiza Khurami di atas, bukanlah tuduhan sepihak. Mengingat campur tangan AS terhadap Afganistan telah dimulai sejak lama. Deepak Tripathi (sejarawan Inggris asal India) mengatakan bahwa Presiden Carter mulai mengirim bantuan rahasia kepada Mujahidin, yang memerangi rezim yang didukung Soviet di Kabul, dan perang proksi skala penuh Amerika melawan pasukan pendudukan Uni Soviet setelah mereka menginvasi Afghanistan pada bulan Desember 1979. Perang AS di Afghanistan selama kepresidenan senior Reagan-Bush adalah bagian dari akhir Perang dingin yang mengarah kepada penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, yang menandai runtuhnya kekaisaran Soviet. Menurutnya Amerika melawan komunisme Soviet dan Afghanistan, dan kemudian melawan al Qaeda dan Taliban<sup>74</sup>.

### **Ideologi Politik Afghanistan di Bawah Rezim Taliban**

Timur tengah disebut-sebut sebagai pentas percaturan politik dunia. Karenanya menurut Gus Dur timur tengah adalah panorama pergolakan yang tak kunjung berhenti dan Afghanistan sebagai kawah pertentangannya<sup>75</sup>. Pandangan Gus Dur tersebut dapat dijadikan pengantar untuk dapat menelusuri lebih dalam ideologi politik Afghanistan, terlebih di bawah rezim Taliban hari ini. Lumrahnya ideologi yang dikembangkan dan diperjuangkan di timur tengah adalah ideologi pendirian negara Islam “khilafah

---

<sup>73</sup> Hafiza Khurami, “Afghanistan and United States foregin relation after September 11th 2001,” *Technium Business and Management* 3 (2023): 1–14.

<sup>74</sup> Deepak Tripathi, “Afghan War,” dalam *Afghanistan and the Vietnam Syndrome: Comparing US and Soviet Wars* (Springer, 2023), 51–64.

<sup>75</sup> KH Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2010), hlm. 136.

Islamiyyah” dan pemurnian syariat Islam untuk menyatukan solidaritas kaum muslimin<sup>76</sup>. Untuk mewujudkan ideologi tersebut mereka menempuh jalur politik atas nama Islam.

Rekam jejak politik Afghanistan mengisahkan tentang perebutan kekuasaan, pemberontakan dalam wujud kudeta dimana keduanya disandarkan terhadap ide gerakan politik Islam. Sejarah mencatat gerakan pemberontakan Taliban dilatari oleh pemberontakan terhadap ideologi komunis pada masa ekspansi Uni Soviet dan ideologi negara demokrasi besutan Amerika<sup>77</sup>. Kenyataan ideologi negara komunis yang tidak memberikan kemakmuran dan malah datang dengan wajah penjajahan secara ideologis, politik dan ekonomi menyulut perlawanan dari kelompok mujahidin Afghanistan yang berujung tersingkirnya paham komunisme Uni Soviet. Pasca perginya pengaruh Soviet, pada masa kekuasaan kelompok Taliban, Amerika Serikat mengintervensi Afghanistan atas dalih menumpas jaringan terorisme. Dari titik inilah potret ideologi politik Afghanistan dibawah rezim Taliban akan tampak jelas.

Syahrir Karim menyimpulkan, eksistensi identitas kelompok aktivisme Islam (ideologi Islam) dipengaruhi oleh sistem politik lokal atau mengikuti alur perpolitikan yang berkembang di suatu negara tersebut<sup>78</sup>. Jika kita memperhatikan alur perpolitikan di Afghanistan dan dikaitkan dengan gerakan Taliban dalam merebut kekuasaan, terlihat dengan jelas bahwa gerakan tersebut bukanlah murni gerakan politik dalam arti Islam itu sendiri. Lebih tepatnya gerakan Taliban tersebut menurut Abdul Munir dan Bilveer Singh adalah gerakan mempolitisasi Agama sebagai ide gerakan untuk mencapai ambisi kelompok fundamentalisme yang berusaha menerapkan syari’at secara tekstual, tertutup dan fanatik dengan disiplin pemahaman keras dan kaku<sup>79</sup>. Temuan penelitian Mohammad Ayub Mirdad menyatakan, Taliban bergandengan tangan dengan kelompok ekstrimisme lainnya terlibat aktif dalam perdagangan opium dan narkoba, penculikan untuk tebusan, pemerasan dan eksploitasi besar-besaran. Hal inilah yang kemudian menjadikan deskripsi negatif tentang Afghanistan sebagai negara perang, negara teroris, negara produsen narkoba<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> Drs Istadiyantha, “Transmisi Ideologi Gerakan Islam Politik Timur Tengah Terhadap Gerakan Islam Politik Di Yogyakarta Dan Surakarta,” 2017.

<sup>77</sup> Asep Supyadillah, “PENERAPAN SYARIAH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DI DUNIA ISLAM,” *Misykat al-Anwar* 27, no. 2 (2016): 115–34.

<sup>78</sup> Syahrir Karim, “Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer,” *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016).

<sup>79</sup> Abdul Munir Mul Khan and Bilveer Singh, *Demokrasi Di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam Dalam Peradaban Modern* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 18.

<sup>80</sup> Mohammad Ayub Mirdad, “Taliban insurgency and transnational organized crime nexus Pemberontakan Taliban dan perhubungan kejahatan transnasional terorganisir,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 33,

Ideologi politik Islam yang dikembangkan oleh Taliban juga disebut sebagai doktrin ideologi politik Islam radikal. Variabel penentu dari pandangan ini adalah kebijakan pemerintah Taliban sejak 1996-2001 dan setelah mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021 telah merampas jutaan hak asasi perempuan di Afghanistan dengan melarang pendidikan anak perempuan di atas kelas enam pada Maret 2022 dan melarang perempuan dari semua universitas pada Desember 2022<sup>81</sup>. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Taliban dipandang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terutama kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan menurut hasil pengamatan Seunghun Chung, kebijakan terkait budaya dan keagamaan jangka pendek yang di ambil oleh Taliban dapat berdampak negatif secara terus-menerus pada pembentukan modal manusia jangka panjang dan pertumbuhan serta pembangunan secara keseluruhan<sup>82</sup>.

Menurut peneliti arah studi dan pandangan di masa mendatang bagi kondisi geopolitik di Afghanistan adalah Instabilitas politik dan keamanan di Afghanistan berdampak signifikan terhadap geopolitik global, khususnya kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri negara-negara terkait. Sebagai simpulan, dibutuhkan kerja sama global dan komprehensif dari aktor-aktor global, baik dari unit analisis negara maupun unit analisis organisasi global. Persoalan internal di Taliban sendiri, akseptansi masyarakat domestik yang sangat rendah, serta resistensi dunia internasional, menjadi kausanya. Kedua, kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil tersebut akan memberikan signifikansi bagi geopolitik global, baik dari sudut unit analisis negara, seperti Amerika Serikat, Cina, India, Pakistan, dan negara lainnya, maupun PBB sebagai badan supranasional. Pada level unit analisis negara, respons negara-negara akan sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang hendak mereka capai. Sedangkan pada level unit analisis organisasi global seperti PBB, respons akan cenderung berpijak pada objektif global, yakni mewujudkan perdamaian. Upaya korektif jangka panjang dari Taliban sendiri dalam menjalankan pemerintahannya akan sangat menentukan sikap PBB ke depan.

#### **D. KESIMPULAN**

Kepemimpinan Taliban di Afghanistan dilatarbelakangi oleh perlawanannya terhadap ideologi komunis masa Uni Soviet dan ideologi negara demokratis liberalis

---

no. 3 (2020): 266–77.

<sup>81</sup> Nikita Brunner dan Alexander Mihailov, “Radical Religious Rule and Human Capital: Evidence from the Taliban Control in Afghanistan (1996-2001),” 2023.

<sup>82</sup> Seung-hun Chung dan Mark Partridge, “Are short-term cultural shocks persistent? Taliban rule and long-run human capital accumulation,” *Journal of Economic Behavior & Organization* 207 (2023): 18–49.

ketika Afghanistan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Taliban yang dibentuk dengan misi mewujudkan negara Islam maka sudah pasti memiliki ideologi negara Islam atau *khilafah Islamiyah*. Namun praktik politik Taliban tidak mencerminkan politik yang digambarkan dalam Islam. Melainkan praktik politik yang dipengaruhi ambisi kelompok fundamentalis yang ingin menerapkan syariat Islam secara tekstual, fanatik dan anarkis. Praktik politik ini membentuk ideologi dan gaya pemerintahan rezim Taliban yang ekstrim, radikal, dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karenanya apa yang tampak dan timbul dari rezim Taliban tidak bisa dijadikan justifikasi dan tuduhan Islam radikal, Islam teroris dan sikap Islamofobia terhadap Islam dan Muslim, yang berangkat dari kenyataan konflik Afghanistan dan praktik politik Taliban merupakan tuduhan yang tidak dapat dibenarkan dan tertolak berdasarkan data historis dari sejarah panjang Afghanistan dan gambaran realita di Afghanistan.

Disisi lain campur tangan dan hegemoni barat “AS” berperan untuk semakin memperburuk keadaan dan mencemari citra Islam dan muslim melalui konflik Afghanistan, sehingga panorama dan terpotret yang dihasilkan adalah kesan negatif terhadap ideologi Islam dan negara muslim. Hal ini menguatkan anggapan bahwa “AS” mengambil keuntungan untuk terus melakukan konfrontasi politik dan memborbardir timur tengah terutama Afghanistan sejak 2001-2021 atas dalih menumpas jaringan terorisme di bumi Afghanistan. Padahal jika di tinjau dari pendekan historiografinya pada permulaan berdirinya Taliban didukung penuh oleh AS namun di pada akhirnya (2001) ditumpas sendiri oleh AS. Jika dilihat dari tinjauan sosiologi politiknya Afghanistan merupakan negara dengan sistem pemerintahan dan bentuk negara yang tidak tetap dan sangat rentan menimbulkan konflik baik bersifat internal dan eksternal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-sulthaniyyah*. Bairut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Ghifari, Ahda Abid. “Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001).” *BAB II Afghanistan sebelum Taliban (skripsi)*: <http://eprints.uny.ac.id/21178/6/BABIIPdf> (hal 36). diakses pada tanggal 23 (2021).
- Ali, Syaikhul Islam, dan Lc M Sosio. *KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Harakah Book, 2018.
- ’Allam, Sauqi. *Qadhaya fiqhu ad-Daulah*. Mesir: Dar al-Ifta’ Misriyyah, 2021.

Aly, Sirojuddin. “Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan),” 2018.

Andani, Rafika Wahyu. “SEGITIGA KEKERASAN, HAM, DAN PEREMPUAN AFGHANISTAN ERA KEPEMIMPINAN TALIBAN.” *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 1 (2022).

Anugerah, Boy. “Krisis Afghanistan dan Implikasi Terhadap Politik Global.” *The American Political Science Review* 56, no. 3 (2022): 567–76.

Anugerah, Boy, dan Jabinson Purba. “Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 13–34.

Anwar Sanusi, AS. *Pemikiran Politik Islam*. Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021.

Azria, Kaiva, dan Erma Ramayani. “SEJARAH PERANG AFGHANISTAN DARI DULU HINGGA KINI.” *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6, no. 2 (2022): 122–37.

———. “SEJARAH PERANG AFGHANISTAN DARI DULU HINGGA KINI.” *Jurnal PIR : Power in International Relations* 6, no. 2 (17 Februari 2022): 122. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137>.

B. Edwards, David. *‘Before Taliban: Genealogis of the Afghan Jihad.’* California Press,: University of California Press, 2022.

Barfield, Thomas J. *Afghanistan: A Cultural and Political History*. Princeton Studies in Muslim Politics. Princeton: Princeton University Press, 2010.

BIBI, RAHIMA. “LEGITIMASI POLITIK PEMERINTAHAN ASRAF GANI DI AFGHANISTAN,” 2018.

Britannica, T. “Mohammad Daud Khan.” *Argon. Encyclopedia Britannica*, 2020. <https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Daud-Khan>.

Britannica, T. Editors. “Nur Mohammad Taraki prime minister of Afghanistan.” Inggris: Encyclopedia Britannica. Diakses 22 Maret 2023. <https://www.britannica.com/biography/Nur-Mohammad-Taraki>.

“Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, December 20). Hamid Karzai. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Hamid-Karzai>,” t.t. Diakses 24 April 2023.

Brunner, Nikita, dan Alexander Mihailov. “Radical Religious Rule and Human Capital: Evidence from the Taliban Control in Afghanistan (1996-2001),” 2023.

Chung, Seung-hun, dan Mark Partridge. “Are short-term cultural shocks

persistent? Taliban rule and long-run human capital accumulation.” *Journal of Economic Behavior & Organization* 207 (2023): 18–49.

Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, dan Aji Wibowo. “PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022): 715–28.

Fanani, Muhammad Farih, dan Adetia Andri. “SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI AFGHANISTAN.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 212, no. 2 (2021). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/9681>.

———. “Sejarah Islam dan Politik di Afghanistan.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 2 (2021): 91–112.

Faulks, Keith. *Sosiologi Politik, Pengantar Kritis Ter. Helmi Mahadi*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM, 2021.

Harahap, Arif Sumantri. *Invisible Diplomacy: The Untold Story Behind The Career of An Indonesian Diplomat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

Hasyim, Muhammad Syarif, dan Randy Atma R Massi. “GERAKAN TALIBAN ANTARA JIHAD, MAKAR SERTA TRAGEDI KEMANUSIAAN DI AFGANISTAN.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 89–118.

Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. “Legalitas Pergantian Kekuasaan Di Afganistan Melalui Coup D’etat Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022): 469–93.

Hilali, A. Z. *US-Pakistan relationship: Soviet invasion of Afghanistan*. US foreign policy and conflict in the Islamic world. Burlington, VT: Ashgate, 2005.

Ibnu Sani, Ahmad Faiz. “241 Ribu Orang Tewas Sejak Amerika Serikat Perangi Taliban.” *Tempo.co*. 22 Agustus 2021, Eksklusif edisi. <https://dunia.tempo.co>.

ISTADIYANTHA, DRS. “TRANSMISI IDEOLOGI GERAKAN ISLAM POLITIK TIMUR TENGAH TERHADAP GERAKAN ISLAM POLITIK DI YOGYAKARTA DAN SURAKARTA,” 2017.

Iswara, Aditya Jaya. “Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan.” *Kompas.com*, 31 Agustus 2021. <https://internasional.kompas.com>.

James, Bell. “The World’s Muslims: Unity and Diversity, Pew Research

Center,” 2016.

———. *The World’s Muslims: Unity and Diversity* Pew Research Center, 2016.

Jauziyyah, Ibnu Qoyyim al-. *at-Turuq al-Hukmiyyah fi Syiasati al-Syar’iyyah*. Jiddah: Majmu’ al-Fiqh al-Islami, 1428.

Karim, Syahrir. “Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer.” *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016).

Katimin, Katimin. *POLITIK ISLAM: Study Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Vol. 1. Perdana Publishing, 2017.

Khaldun, Muhammad bin, dan Al-Allamah Abdurrahman. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar, 2001.

Khurami, Hafiza. “Afghanistan and United States foregin relation after September 11th 2001.” *Technium Business and Management* 3 (2023): 1–14.

Khurunâ, Irza. “Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan.” *Transformasi Global* 3, no. 1 (2016).

Lee, Jonathan L. *Afghanistan A History From 1260 to The Present*. 1 ed. London: Reaktion Books LTD, 2018.

LP2M Universitas Medan Area. “Mengenal Desk Research: Definisi, Tips Beserta Contoh,” Desember 2021. [lp2m.uma.ac.id](http://lp2m.uma.ac.id).

Mannan, Abd. “Islam dan Negara.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014).

Mawardi, Imam, Lutfirahman, dan Umi Nur Idayanti. “Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian.” *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/12160>.

Mirdad, Mohammad Ayub. “Taliban insurgency and transnational organized crime nexus Pemberontakan Taliban dan perhubungan kejahatan transnasional terorganisir.” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 33, no. 3 (2020): 266–77.

Mulkhan, Abdul Munir, dan Bilveer Singh. *Demokrasi di bawah bayangan mimpi N-11: dilema politik Islam dalam peradaban modern*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.

Mursyid, Salma. “PIAGAM MADINAH DAN UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 1, no. 1 (2016).

Musta'id, Ahmad. "Sejarah Islam dan Politik Afghanistan." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 6, no. 2 (29 Desember 2022): 214–27. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605>.

Nafisah, Durrotun. "Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Naumkin, Vitaly V. "The future of Afghanistan after elections: Predictable uncertainty." *future*, 2014.

Naz, Samra, dan Zafar Nawaz Jaspal. "Afghanistan: The Possible Arena for Major Powers Inevitable Cooperation." *South Asian Studies* 36, no. 1 (2022).

Pratiwi, Fi. "Kerjasama Kemitraan Strategis Afghanistan Dengan Amerika Serikat dibawah Kepemimpinan Hamid Karzai Pada Tahun 2012," 2013.

Pulungan, Jufri Suyuthi. "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an." *Intizar* 24, no. 1 (2018): 185–202.

Purba, Safna Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya. "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump." *Journal of International Relations* 8, no. 3 (2022): 346–56.

Putra, Kadek Surya Alit Dharma. "ANEKSASI AFGHANISTAN TERHADAP TALIBAN TAHUN 2021." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022): 915–27.

Qarqeen, Freshta. "Afghan Peace Talks: Negotiating with the Taliban," 2015.

Rabi, Ibn Abi. *Suluk al-Malik fi tadbir al-mamalik*. Kairo: Dar al-Sya'ab, 1970.

Ridley, Yvonne. *In the Hands of the Taliban: Her Extraordinary Story*. London: Robson Books, 2001.

Runion, Meredith L. *The history of Afghanistan*. The Greenwood histories of the modern nations. Westport, Conn: Greenwood Press, 2007.

Runion, Meredith L. *The history of Afghanistan*. ABC-CLIO, 2017.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan Pemikiran*. UI press, 1990.

Strick van Linschoten, Alex, dan Felix Kuehn. *An enemy we created: the myth of the Taliban-al Qaeda merger in Afghanistan*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

Sugara, Robi. "Upaya dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian di

Afghanistan Melalui Bina-Damai.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5, no. 1 (2021): 27–38.

Supyadillah, Asep. “PENERAPAN SYARIAH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DI DUNIA ISLAM.” *Misykat al-Anwar* 27, no. 2 (2016): 115–34.

Susilowati, Ida, S.Thoriq Musthofa Ahmad, Sepana Virqiyani, dan Azzam El Zahidin. “Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (31 Maret 2022): 443–56.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788>.

Tesch, Noah. “Najibullah president of Afghanistan.” *Article History. Encyclopedia Britannica*, 1 Januari 2023.  
<https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Najibullah>.

Tripathi, Deepak. “Afghan War.” Dalam *Afghanistan and the Vietnam Syndrome: Comparing US and Soviet Wars*, 51–64. Springer, 2023.

Umam, Khotibul. “Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021,” 1:257–66, 2022.

Wahid, KH Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2010.

Yahya, Syarif. *Kamus Sejarah Agama Islam: Nama, Kronologi, Peristiwa Syarif Yahya*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.

Za‘if, ‘Abd al-Salām, Alex Strick van Linschoten, dan Felix Kuehn. *My life with the Taliban*. New York: Columbia University Press, 2010.

Zhafir, Ali Zhafir Talmullah. “Realisasi Perjanjian Perdamaian DOHA Dialogue antara Afghanistan-Amerika Serikat dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 2, no. 2 (2022): 94–104